

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN BELANJA MODAL TERHADAP *FISCAL STRESS* PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR

Nonce Farida Tuati¹, Deetje Wieske Manuain², Hapsa Usman³
noncefaridatuati@gmail.com¹, d3c3wm@yahoo.com², hapsagemini1978@gmail.com³
Politeknik Negeri Kupang

Abstrak

Otonomi daerah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah agar mengelola pemerintahan serta keuangannya secara mandiri dengan didasari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah tentunya setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi yang dimilikinya agar mampu membiayai dirinya sendiri sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Fiscal Stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Belanja modal daerah merupakan bagian dari belanja daerah yang termasuk sebagai pengeluaran pemerintah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kondisi *fiscal stress* dapat diatasi apabila setiap daerah dapat menggali potensi yang dimiliki secara maksimal ataupun melakukan minimalisasi pembiayaan daerah sehingga anggaran daerah tidak mengalami defisit. Terjadinya *fiscal stress* dapat diantisipasi dengan memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 22 pemerintah kabupaten/kota mengalami hal yang sama, masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. PAD dari setiap daerah masih sangat kecil dan belum mampu membiayai belanja daerahnya, bahkan belanja modalnya masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya *fiscal stress*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu akuntansi dan dapat menjadi referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/ Kota ataupun dari BPS NTT. Teknik Analisis Data yang digunakan meliputi uji penyimpangan asumsi klasik dan analisis regresi berganda serta uji T dan uji F. Sedangkan model persamaan regresi berganda yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, pertumbuhan PAD berpengaruh secara positif terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan belanja modal berpengaruh secara negative terhadap *fiscal stress*, dan kedua, secara simultan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*, Luaran penelitian ini adalah berupa kajian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan *Fiscal Stress* yang di publikasikan pada Jurnal Riset Akuntansi dan *Auditing "Goodwill"* pada Universitas Zam Ratulangi. TKT penelitian yang diusulkan adalah TKT 3.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Fiscal Stress.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah agar mengelola pemerintahan serta keuangannya secara mandiri dengan didasari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah tentunya setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi yang dimilikinya agar mampu membiayai

dirinya sendiri sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kita masih melihat kendala-kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, banyak daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) masih sangat minim dan belum bisa membiayai daerahnya sendiri atau dengan kata lain masih bergantung pada tranfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah yang diharapkan masih jauh dan membutuhkan upaya pemerintah daerah untuk berbenah diri agar mampu menjadi daerah yang otonom.

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (1). Fiscal stress dapat diartikan sebagai kondisi defisit anggaran. Di mana hal tersebut terjadi apabila pemerintah daerah tidak mampu membiayai belanja daerah secara mandiri. Dengan kata lain, disaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah tidak dapat memenuhi belanja modal maka, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi fiscal stress. Kondisi fiscal stress dapat diatasi apabila setiap daerah dapat menggali potensi yang dimiliki secara maksimal ataupun melakukan minimalisasi pembiayaan daerah sehingga anggaran daerah tidak mengalami defisit. Terjadinya fiscal stress dapat diantisipasi dengan memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 22 pemerintah kabupaten/kota mengalami hal yang sama, dimana pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan pendapatan asli daerah tetapi masih sangat bergantung pada tranfer pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Kondisi PAD dan Dana Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	PAD	Dana Transfer	Total Penerimaan	%
1	Kota Kupang	178.550.982.758	855.345.567.768	1.112.762.400.526	16,05
2	Kabupaten Kupang	82.123.882.000	1.083.590.337.814	1.251.937.479.814	6,56
3	Kabupaten TTS	110.000.000.000	1.487.533.898.222	1.621.240.035.879	6,78
4	Kabupaten TTU	56.166.857.367	1.064.583.339.330	1.193.612.098.697	4,71
5	Kabupaten Belu	95.000.000.000	791.458.254.097	938.288.326.572	10,12
6	Kabupaten Malaka	37.679.612.260	728.670.232.625	814.706.824.885	4,62
7	Kabupaten Alor	62.195.740.908	956.466.258.672	1.065.911.039.580	5,83
8	Kabupaten Lembata	54.796.736.943	742.869.084.002	830.139.770.945	6,60
9	Kabupaten Flores Timur	47.055.616.608	1.022.980.387.746	1.106.220.970.565	4,25
10	Kabupaten Sika	101.122.764.425	1.034.709.865.575	1.183.365.000.000	8,55
11	Kabupaten Ende	80.445.342.400	1.114.422.290.771	1.284.200.949.171	6,26
12	Kabupaten Nagekeo	68.213.344.512	684.481.194.518	759.253.461.130	8,98
13	Kabupaten Ngada	62.432.618.700	706.592.850.305	799.804.709.005	7,81
14	Kabupaten Manggari Timur	77.434.056.000	985.626.245.964	1.142.577.143.232	6,78
15	Kabupaten Manggarai	113.292.566.220	962.175.891.473	1.161.924.267.693	9,75
16	Kabupaten Manggarai Barat	326.531.109.317	1.020.115.789.807	1.411.247.220.124	23,14
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	33.049.189.395	933.167.232.342	1.038.790.195.694	3,18
18	Kabupaten Sumba Barat	57.288.277.468	610.679.612.920	696.169.000.388	8,23
19	Kabupaten Sumba Tengah	35.766.445.215	610.267.959.736	651.360.114.259	5,49
20	Kabupaten Sumba Timur	108.430.950.167	1.036.945.156.000	1.204.102.506.167	9,01
21	Kabupaten Sabu Raijua	52.807.914.678	521.635.689.466	593.411.732.241	8,90
22	Kabupaten Rote Ndao	27.191.775.000	768.349.658.000	833.600.553.000	3,26

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di NTT masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. PAD dari setiap daerah masih sangat kecil dan belum mampu membiayai belanja daerahnya, bahkan belanja modalnya masih sangat bergantung pada dana transfer. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya *fiscal stress*. Melihat fenomena ini dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara

Timur, untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap fiscal stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap fiscal stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu akuntansi dan dapat menjadi referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah. Urgensi penelitian ini adalah dengan adanya hasil/luaran penelitian ini berguna pemerintah kabupaten/kota di NTT mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di daerahnya lebih khusus pengelolaan PAD dan belanja modal di daerahnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Peneliti menggunakan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dari analisis dampak Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal dan terhadap Fiscal Stress. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Data sekunder tersebut didapatkan langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu dalam bentuk Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021. Dalam Laporan Realisasi APBD tersebut penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.

Teknik Analisis Data yang digunakan meliputi uji penyimpangan asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas serta uji T dan uji F. Sedangkan model persamaan regresi berganda yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, dimana: $Y =$ Fiscal Stress, $X_1 =$ Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, $X_2 =$ Pertumbuhan Belanja Modal, $a =$ konstanta, $b_1, b_2 =$ koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 4,600 dengan nilai thitung $>$ ttabel ($4,600 > 2,03693$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Yang artinya bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap fiscal stress (tekanan keuangan) yang dialami pemerintah daerah tersebut. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi dalam pengelolaan PAD.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2012) dan Septira, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap *Fiscal stress*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Adriana, dkk (2017) yang mana hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*, tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,036 dengan nilai koefisien sebesar -2,189 dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,189 < 2,03693$) dan nilai signifikan $0,036 < 0,05$. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan belanja modal akan diikuti oleh penurunan *fiscal stress*. Dalam menghadapi otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Usaha dalam peningkatan pelayanan publik ini akan semakin baik jika mendapatkan dukungan dari segi tingkat pembiayaan yang baik pula. Perubahan pembiayaan lebih banyak disebabkan adanya tuntutan meningkatkannya pelayanan publik di suatu daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan dana alokasi atau terjadinya pergeseran dari belanja daerah untuk lebih mementingkan kepentingan pelayanan publik secara langsung, pada jangka panjang dengan semakin meningkatkannya kualitas infrastuktur suatu daerah pada akhirnya akan memotivasi masyarakat untuk dapat bekerja dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan fiskal jangka panjang maupun jangka pendek daerahnya. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja modal dapat mempengaruhi *fiscal stress*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Syifa, (2021) dimana pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*.

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji f), dapat dinyatakan bahwa variabel independen Pertumbuhan PAD (X1) dan Pertumbuhan Belanja Modal (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Fiscal stress* (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai $f_{hitung} = 10,846$ dan nilai $f_{tabel} = 3,28$ dengan nilai signifikansinya 0,00 maka, $f_{hitung} (10,846) > f_{tabel} (3,28)$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ dari hasil pengujian koefisien determinasi maka dapat diketahui pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress* sebesar 40,4%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muda, (2012) dimana secara simultan Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka simpulan penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*, dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 4,600 dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,600 > 2,03693$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah maka diprediksikan akan mengurangi tingkat *fiscal stress*.
2. Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*, dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,036 dengan nilai koefisien sebesar -2,189 dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,189 < 2,03693$) dan nilai signifikan $0,036 < 0,05$. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pertumbuhan belanja modal, maka *Fiscal Stress* akan semakin rendah.
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) dan Pertumbuhan Belanja Modal (X2) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap *Fiscal Stress* (Y) pada Pemerintah Daerah Sedaratan Pulau Timor. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai $f_{hitung} = 10,846$ dan nilai $f_{tabel} = 3,28$ dengan nilai signifikansinya 0,00 maka, $f_{hitung} (10,846) > f_{tabel} (3,28)$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, hasil pengujian

R2 maka, diketahui pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress* sebesar 40,4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnett, s. (2012). Fiscal stress in the U.S. States: An Analysis of measures and Fiscal stress in the U.S. States : An Analysis of Measures and Responses.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- R. Gunawan, F. 2014. Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaiful. 2016. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Purbalingga.
- Septira, F., Farida, I., dan Prawita,A. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fiscal stress. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No.1, [Januari-Juni], 2019 :57-64.
- Shamsub , H., dan Akoto, J.B. (2014). Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol, 16. No. 1, 40-61.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.